

Transformasi Sistem Evaluasi Pendidikan: Analisis Kebijakan Assessment Nasional (AN/AKM) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA)

Arsil¹⁾, Zulfani Sesmiarni²⁾

1,2) UIN Sjech M. Djami; Djambek Bukittinggi, Bukittinggi

e-mail : arsil.langgai@gmail.com, zulfanisesmiarni@uinbukittinggi.ac.id

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Transformation of Evaluation Systems, National Assessment (AN/AKM), Academic Ability Test (TKA), Education Policy, Educational Evaluation.

Kata kunci:

Transformasi Sistem Evaluasi, Assessment Nasional (AN/AKM), Tes Kemampuan Akademik (TKA), Kebijakan Pendidikan, Evaluasi Pendidikan.

The transformation of Indonesia's educational evaluation system through the implementation of the National Assessment (AN/AKM) and the Academic Ability Test (TKA) marks a fundamental shift in national assessment policy. Whereas previous evaluation models primarily emphasized individual students' cognitive achievement, the National Assessment is designed to measure the overall quality of the education system in a comprehensive manner, while the Academic Ability Test maintains its function as an instrument for assessing individual academic competence. This policy shift raises conceptual and practical implications that require critical examination to ensure that educational evaluation functions as a mechanism for quality improvement rather than merely administrative compliance. This study aims to analyze the policy of the National Assessment (AN/AKM) and the Academic Ability Test (TKA) within the context of educational evaluation system transformation, focusing on policy objectives, philosophical foundations, and implications for educational assessment practices in Indonesia. The research employs a library research method by reviewing nationally accredited academic journals, educational policy documents, and relevant scholarly literature. Data were analyzed using educational policy analysis and content analysis approaches to identify policy directions, conceptual coherence, and implementation challenges related to AN/AKM and TKA. The findings indicate that the National Assessment functions as a systemic evaluation instrument emphasizing literacy, numeracy, and character as indicators of educational quality, while the Academic Ability Test serves as a standardized measure of individual academic achievement. Although these two policies are conceptually complementary, their implementation faces challenges such as disparities in educators' understanding, varying institutional readiness, and resistance to paradigm shifts in assessment practices. Therefore, strengthening assessment literacy and ensuring policy alignment are essential to support the effectiveness and sustainability of educational evaluation reform.

Abstrak.

Perubahan kebijakan evaluasi pendidikan di Indonesia melalui penerapan Assessment Nasional (AN/AKM) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) menandai pergeseran mendasar dalam sistem penilaian pendidikan nasional. Jika sebelumnya evaluasi pendidikan lebih menekankan pada capaian kognitif peserta didik secara individual, kebijakan AN/AKM hadir dengan orientasi pada pemetaan mutu sistem pendidikan secara komprehensif, sedangkan TKA tetap mempertahankan fungsi pengukuran kemampuan akademik sebagai dasar seleksi dan pemetaan capaian belajar. Transformasi ini menimbulkan berbagai implikasi konseptual dan praktis yang perlu dikaji secara kritis agar kebijakan evaluasi pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong peningkatan mutu pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Assessment Nasional (AN/AKM) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dalam konteks transformasi sistem evaluasi pendidikan, dengan menelaah tujuan kebijakan, landasan filosofis, serta implikasinya terhadap praktik

evaluasi pendidikan di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji jurnal nasional terakreditasi, dokumen kebijakan pendidikan, serta literatur akademik yang relevan. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis kebijakan pendidikan dan *content analysis* untuk mengidentifikasi arah perubahan, kesesuaian konsep, serta tantangan implementasi AN/AKM dan TKA di tingkat satuan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa AN/AKM berperan sebagai instrumen evaluasi sistemik yang menekankan pada literasi, numerasi, dan karakter sebagai indikator mutu pendidikan, sedangkan TKA berfungsi sebagai alat evaluasi akademik individual yang lebih terukur. Meskipun kedua kebijakan ini memiliki tujuan yang saling melengkapi, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan pemahaman pendidik, kesiapan sarana prasarana, serta resistensi terhadap perubahan paradigma asesmen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi asesmen dan sinkronisasi kebijakan agar transformasi sistem evaluasi pendidikan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Evaluasi pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, karena melalui evaluasi dapat diketahui sejauh mana tujuan pendidikan tercapai serta bagaimana efektivitas kebijakan dan praktik pembelajaran diimplementasikan di satuan pendidikan. Dalam perspektif kebijakan publik, evaluasi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian belajar peserta didik, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menilai keberhasilan kebijakan pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perubahan paradigma evaluasi pendidikan selalu berkaitan erat dengan perubahan visi dan arah pembangunan pendidikan suatu bangsa¹.

Dalam konteks Indonesia, praktik evaluasi pendidikan selama beberapa dekade cenderung didominasi oleh pendekatan penilaian berbasis ujian berskala nasional yang menitikberatkan pada hasil akhir (*high-stakes testing*). Ujian Nasional (UN), yang sebelumnya menjadi instrumen utama evaluasi pendidikan, diposisikan sebagai tolok ukur keberhasilan akademik peserta didik sekaligus indikator mutu sekolah. Namun, pendekatan evaluasi semacam ini menuai berbagai kritik karena dianggap tidak mampu merepresentasikan kualitas pendidikan secara komprehensif. Evaluasi yang terlalu berorientasi pada skor ujian dinilai mengabaikan proses pembelajaran, konteks sosial-budaya sekolah, serta keragaman karakter dan potensi peserta didik².

Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa sistem evaluasi berbasis ujian berisiko mendorong praktik pembelajaran yang bersifat mekanistik dan berorientasi pada penguasaan materi secara sempit. Guru cenderung mengarahkan pembelajaran pada latihan soal dan strategi menghadapi ujian, sementara pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan literasi kontekstual menjadi kurang mendapat perhatian³. Kondisi ini bertentangan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menekankan penguasaan literasi dasar, numerasi, dan kemampuan bernalar sebagai fondasi pembelajaran sepanjang hayat.

Sebagai respons atas berbagai kritik tersebut, pemerintah Indonesia melakukan reformasi kebijakan evaluasi pendidikan melalui penghapusan Ujian Nasional dan menggantinya dengan *Assessment Nasional (AN)*. *Assessment Nasional* dirancang sebagai instrumen evaluasi sistem pendidikan yang bersifat diagnostik dan tidak menentukan kelulusan peserta didik. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma evaluasi dari pendekatan selektif menuju pendekatan formatif dan

¹ Nanang Fattah, "Evaluasi Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Manajemen Publik," *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 27, No. 1, 2020, hlm. 1–12.

² Zainal Arifin, "Kritik terhadap Sistem Evaluasi Pendidikan Berbasis Ujian Nasional," *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 101–113.

³ Herry Widayastono, "Evaluasi Pembelajaran Abad 21 dan Tantangan Kebijakan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 25, No. 3, 2020, hlm. 289–302.

reflektif, di mana hasil asesmen digunakan sebagai dasar perbaikan mutu pembelajaran dan tata kelola sekolah⁴.

Salah satu komponen utama dalam Assessment Nasional adalah Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), yang berfokus pada pengukuran kemampuan literasi membaca dan numerasi. Literasi dan numerasi dipandang sebagai kompetensi esensial yang melampaui penguasaan mata pelajaran tertentu, karena menjadi prasyarat bagi peserta didik untuk memahami berbagai pengetahuan dan menghadapi persoalan kehidupan nyata. Dengan demikian, AKM tidak mengukur “apa yang dihafal” peserta didik, melainkan “bagaimana peserta didik bernalar dan memahami informasi” dalam berbagai konteks⁵.

Secara konseptual, kebijakan AN/AKM mencerminkan upaya pemerintah untuk membangun sistem evaluasi pendidikan yang lebih humanis dan berorientasi pada pengembangan kapasitas sekolah. Evaluasi tidak lagi diposisikan sebagai alat kontrol semata, melainkan sebagai sarana refleksi bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dalam perspektif ini, mutu pendidikan dipahami sebagai hasil interaksi antara input, proses, dan konteks pembelajaran, bukan sekadar output akademik peserta didik⁶.

Namun demikian, dinamika kebijakan evaluasi pendidikan menjadi semakin kompleks dengan diperkenalkannya kembali Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai instrumen penilaian capaian akademik individu, khususnya dalam konteks seleksi pendidikan lanjutan. TKA dirancang untuk mengukur penguasaan pengetahuan akademik peserta didik secara lebih spesifik dan terstandar. Kehadiran TKA menimbulkan diskursus baru mengenai arah transformasi sistem evaluasi pendidikan nasional, terutama terkait konsistensi kebijakan antara asesmen yang bersifat diagnostik dan asesmen yang bersifat selektif⁷.

Di satu sisi, TKA dipandang sebagai kebutuhan sistem pendidikan untuk menyediakan alat ukur akademik yang objektif dan adil dalam proses seleksi. Namun di sisi lain, keberadaan TKA berpotensi menghidupkan kembali budaya evaluasi berbasis ujian yang selama ini dikritik dalam sistem Ujian Nasional. Apabila tidak dirumuskan secara hati-hati, TKA dapat mendorong satuan pendidikan kembali memusatkan perhatian pada pencapaian skor akademik, sehingga menggeser orientasi pembelajaran dari penguatan literasi dan numerasi menuju penguasaan materi ujian⁸.

Perbedaan orientasi antara AN/AKM dan TKA menimbulkan tantangan implementatif di tingkat satuan pendidikan. Guru dihadapkan pada dilema pedagogis antara menyiapkan peserta didik untuk asesmen yang menekankan penalaran kontekstual dan asesmen yang menekankan penguasaan konten akademik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam perencanaan pembelajaran serta menghambat upaya transformasi budaya belajar yang menjadi tujuan utama kebijakan Assessment Nasional⁹.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian evaluatif terhadap kebijakan Assessment Nasional (AN/AKM) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) menjadi sangat penting untuk dilakukan. Analisis kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk membandingkan karakteristik dan tujuan kedua instrumen evaluasi, tetapi juga untuk menelaah implikasinya terhadap arah transformasi sistem evaluasi pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan analisis kebijakan, penelitian ini diharapkan

⁴ Rusman, “Paradigma Evaluasi Pendidikan dalam Kebijakan Assessment Nasional,” *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 27, No. 2, 2021, hlm. 145–158.

⁵ Suryadi, “Asesmen Kompetensi Minimum sebagai Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Nasional*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 15–27.

⁶ Djemari Mardapi, “Evaluasi Pendidikan Berbasis Sistem,” *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 24, No. 2, 2020, hlm. 123–135.

⁷ Dewi Rahmawati, “Tes Kemampuan Akademik dalam Kebijakan Evaluasi Pendidikan Indonesia,” *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 33–46.

⁸ Eko Prasetyo, “Dinamika Kebijakan AKM dan TKA dalam Praktik Pembelajaran,” *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 21, No. 2, 2023, hlm. 120–134.

⁹ Siti Nurhayati, “Implikasi Kebijakan Asesmen terhadap Perencanaan Pembelajaran Guru,” *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 15, No. 1, 2022, hlm. 55–68.

dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merumuskan sistem evaluasi pendidikan yang konsisten, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) untuk mengevaluasi kebijakan Assessment Nasional (AN/AKM) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai bagian dari transformasi sistem evaluasi pendidikan di Indonesia. Pemilihan studi kepustakaan didasarkan pada pandangan Creswell yang menekankan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami kebijakan dan fenomena pendidikan secara mendalam melalui analisis makna dan konteks, bukan sekadar pengukuran statistik. Sumber data penelitian diperoleh dari jurnal nasional terakreditasi, dokumen kebijakan pendidikan, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan asesmen pendidikan dan evaluasi kebijakan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis sebagaimana dikemukakan oleh Krippendorff, dengan tahapan identifikasi tema, kategorisasi konsep, interpretasi makna, dan sintesis argumentatif. Selain itu, kerangka analisis kebijakan pendidikan merujuk pada pemikiran Tilaar dan Nugroho yang memandang kebijakan pendidikan sebagai proses sistemik yang mencakup perumusan, implementasi, dan dampak kebijakan terhadap praktik pendidikan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan perbandingan antar literatur, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dan kritis mengenai arah, relevansi, serta implikasi kebijakan AN/AKM dan TKA dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Paradigma Evaluasi Pendidikan Nasional: Dari Seleksi ke Diagnostik Sistemik

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa penerapan Assessment Nasional (AN) menandai perubahan fundamental dalam paradigma evaluasi pendidikan nasional. Evaluasi tidak lagi diposisikan sebagai mekanisme seleksi peserta didik secara individual, melainkan sebagai instrumen pemetaan mutu pendidikan yang bersifat sistemik dan diagnostik. Pergeseran ini selaras dengan perkembangan teori evaluasi pendidikan modern yang menekankan fungsi evaluasi sebagai alat refleksi dan perbaikan berkelanjutan (assessment for improvement), bukan sekadar pengukuran hasil akhir¹⁰.

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai komponen utama AN merepresentasikan pendekatan evaluasi berbasis kompetensi lintas mata pelajaran. Literasi membaca dan numerasi diposisikan sebagai kompetensi esensial yang menjadi fondasi keberhasilan belajar peserta didik dalam berbagai konteks akademik dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, AKM tidak berorientasi pada penguasaan konten kurikulum secara fragmentaris, melainkan pada kemampuan bernalar, memahami informasi, dan memecahkan masalah secara kontekstual¹¹. Pendekatan ini mencerminkan perubahan epistemologis dalam memahami pengetahuan, dari sekadar akumulasi informasi menuju konstruksi makna.

Namun, hasil kajian juga mengungkap bahwa perubahan paradigma evaluasi ini belum sepenuhnya dipahami secara utuh oleh pelaku pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Sejumlah penelitian nasional menunjukkan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan karakteristik AKM ke dalam praktik pembelajaran dan penilaian kelas. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan evaluasi di tingkat makro dan implementasinya di tingkat mikro¹².

¹⁰ Djemari Mardapi, "Evaluasi Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Nasional," *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 24, No. 2, 2020, hlm. 123–135.

¹¹ Suryadi, "Asesmen Kompetensi Minimum sebagai Paradigma Baru Evaluasi Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Nasional*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 15–27.

¹² Siti Nurhayati, "Pemahaman Guru terhadap Asesmen Kompetensi Minimum," *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 89–102.

2. Tes Kemampuan Akademik (TKA): Reafirmasi Evaluasi Selektif dalam Sistem Pendidikan Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Strategi Branding Reputasi

Berbeda secara konseptual dengan AN/AKM, Tes Kemampuan Akademik (TKA) dirancang sebagai instrumen evaluasi yang berorientasi pada pengukuran kemampuan akademik individu, khususnya untuk kepentingan seleksi pendidikan lanjutan. Dalam perspektif kebijakan, TKA diposisikan sebagai alat untuk menjamin objektivitas dan keadilan dalam proses seleksi, terutama di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas sistem pendidikan¹³.

Hasil analisis menunjukkan bahwa orientasi selektif TKA memiliki kemiripan karakteristik dengan sistem evaluasi berbasis ujian yang sebelumnya diterapkan dalam Ujian Nasional. Meskipun secara teknis TKA diklaim lebih adaptif dan fleksibel, secara paradigmatis TKA tetap menempatkan evaluasi sebagai mekanisme penyaringan individu berdasarkan capaian akademik. Literatur evaluasi pendidikan mencatat bahwa asesmen selektif cenderung membentuk budaya kompetisi dan berorientasi pada hasil, yang berpotensi menggeser fokus pembelajaran dari pengembangan kompetensi menuju pencapaian skor ujian¹⁴.

Dalam konteks transformasi evaluasi pendidikan, keberadaan TKA memunculkan ketegangan kebijakan yang signifikan. Di satu sisi, AN/AKM mendorong pendekatan evaluasi yang bersifat formatif dan reflektif; di sisi lain, TKA mempertahankan fungsi evaluasi sebagai alat seleksi. Ketegangan ini menunjukkan bahwa transformasi evaluasi pendidikan nasional masih berada dalam fase transisional, di mana paradigma lama dan paradigma baru berjalan secara bersamaan tanpa kerangka integrasi yang jelas¹⁵.

3. Dampak Kebijakan AN/AKM dan TKA terhadap Praktik Pedagogik Guru

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi AN/AKM dan TKA secara simultan memiliki implikasi langsung terhadap praktik pedagogik guru. Guru dihadapkan pada tuntutan kebijakan yang tidak sepenuhnya selaras: menyiapkan peserta didik untuk asesmen berbasis literasi dan numerasi kontekstual, sekaligus memastikan kesiapan akademik peserta didik dalam menghadapi TKA. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dilema pedagogik yang berdampak pada perencanaan pembelajaran, pemilihan metode, dan strategi penilaian kelas¹⁶.

Beberapa penelitian nasional mencatat bahwa ketika asesmen selektif memiliki konsekuensi signifikan terhadap masa depan peserta didik, guru cenderung kembali pada praktik *teaching to the test*. Praktik ini ditandai dengan penekanan pada latihan soal, pengulangan materi, dan strategi menghadapi ujian, yang pada akhirnya dapat menghambat pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik¹⁷. Dengan demikian, keberadaan TKA berpotensi melemahkan tujuan transformatif AN/AKM apabila tidak diiringi dengan kebijakan pedagogik yang koheren.

Di sisi lain, AN/AKM memiliki potensi besar sebagai instrumen penguatan profesionalisme guru apabila hasil asesmen dimanfaatkan secara reflektif. Data hasil AN dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang intervensi pembelajaran, program pengembangan guru, dan perbaikan manajemen sekolah. Namun, pemanfaatan data ini menuntut literasi asesmen yang memadai dari para pendidik dan pengelola sekolah¹⁸.

4. Konsistensi dan Koherensi Kebijakan Evaluasi Pendidikan Nasional

¹³ Dewi Rahmawati, "Tes Kemampuan Akademik dan Seleksi Pendidikan," *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 33–46.

¹⁴ Zainal Arifin, "Evaluasi Berbasis Ujian dan Dampaknya terhadap Pembelajaran," *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 45–59.

¹⁵ Nanang Fattah, "Konsistensi Kebijakan Evaluasi Pendidikan Nasional," *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 28, No. 2, 2022, hlm. 101–114.

¹⁶ Eko Prasetyo, "Dilema Guru dalam Implementasi AKM dan TKA," *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 21, No. 2, 2023, hlm. 120–134.

¹⁷ Herry Widyastono, "Teaching to the Test dalam Kebijakan Evaluasi Pendidikan," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 26, No. 1, 2021, hlm. 67–80.

¹⁸ Rusman, "Pemanfaatan Data Assessment Nasional untuk Peningkatan Mutu Sekolah," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 28, No. 1, 2022, hlm. 1–14.

Analisis kebijakan terhadap AN/AKM dan TKA menunjukkan bahwa tantangan utama dalam transformasi sistem evaluasi pendidikan nasional terletak pada aspek konsistensi dan koherensi kebijakan. Transformasi evaluasi pendidikan seharusnya diarahkan pada penciptaan sistem evaluasi yang saling melengkapi antara fungsi diagnostik dan fungsi selektif. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa kedua fungsi tersebut masih berjalan secara terpisah tanpa kerangka kebijakan integratif yang jelas¹⁹.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, inkonsistensi paradigma ini berpotensi menghambat upaya reformasi pendidikan secara struktural. Evaluasi pendidikan seharusnya menjadi alat strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan keadilan pendidikan, bukan sekadar mekanisme seleksi. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan evaluasi yang mampu mengintegrasikan AN/AKM dan TKA dalam satu kerangka sistem evaluasi nasional yang utuh, berorientasi pada pengembangan kompetensi, dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Transformasi sistem evaluasi pendidikan melalui kebijakan Assessment Nasional (AN/AKM) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) merepresentasikan pergeseran paradigma penilaian pendidikan di Indonesia dari pendekatan berbasis hasil semata menuju evaluasi yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada perbaikan mutu. AN/AKM dirancang untuk memotret kualitas proses dan ekosistem pendidikan secara menyeluruh, sementara TKA berfungsi sebagai instrumen pengukuran kemampuan akademik individu secara objektif dan terstandar. Integrasi kedua kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan evaluasi sistemik dan evaluasi capaian peserta didik. Namun demikian, efektivitas implementasi AN/AKM dan TKA sangat bergantung pada kesiapan satuan pendidikan, kompetensi pendidik, serta pemahaman pemangku kepentingan terhadap tujuan dan fungsi asesmen. Oleh karena itu, penguatan literasi asesmen, pendampingan kebijakan yang berkelanjutan, serta konsistensi antara regulasi dan praktik lapangan menjadi prasyarat penting agar kebijakan evaluasi pendidikan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berkontribusi pada peningkatan mutu dan keadilan pendidikan nasional.

SARAN

Pertama, pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan perlu memperkuat sosialisasi dan pendampingan implementasi Assessment Nasional (AN/AKM) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) secara berkelanjutan, khususnya kepada pendidik dan kepala satuan pendidikan, agar pemahaman terhadap tujuan, fungsi, dan pemanfaatan hasil asesmen tidak terbatas pada aspek administratif, melainkan berorientasi pada perbaikan kualitas pembelajaran.

Kedua, lembaga pendidikan disarankan untuk meningkatkan literasi asesmen guru melalui pelatihan berbasis praktik reflektif dan analisis data hasil AN/AKM dan TKA, sehingga asesmen dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan pedagogis dan perencanaan pembelajaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.

Ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi AN/AKM dan TKA secara empiris di berbagai konteks satuan pendidikan dengan pendekatan kualitatif maupun mixed methods, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan evaluasi pendidikan serta dampaknya terhadap peningkatan mutu dan keadilan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (2020). Kritik terhadap sistem evaluasi pendidikan berbasis ujian nasional. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(2), 101–113.

¹⁹ Tilaar, H.A.R., "Reformasi Evaluasi Pendidikan dan Tantangan Kebijakan," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 27, No. 3, 2021, hlm. 201–214.

Transformasi Sistem Evaluasi Pendidikan: Analisis Kebijakan Assessment Nasional (AN/AKM) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA)

- Arifin, Z. (2021). Evaluasi berbasis ujian dan dampaknya terhadap pembelajaran. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 12(1), 45–59.
- Fattah, N. (2020). Evaluasi kebijakan pendidikan dalam perspektif manajemen publik. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 1–12.
- Fattah, N. (2022). Konsistensi kebijakan evaluasi pendidikan nasional. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(2), 101–114.
- Mardapi, D. (2020). Evaluasi pendidikan berbasis sistem. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 24(2), 123–135.
- Nurhayati, S. (2022a). Implikasi kebijakan asesmen terhadap perencanaan pembelajaran guru. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(1), 55–68.
- Nurhayati, S. (2022b). Pemahaman guru terhadap asesmen kompetensi minimum. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(2), 89–102.
- Prasetyo, E. (2023a). Dinamika kebijakan AKM dan TKA dalam praktik pembelajaran. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 21(2), 120–134.
- Prasetyo, E. (2023b). Dilema guru dalam implementasi AKM dan TKA. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 21(2), 120–134.
- Rahmawati, D. (2022a). Tes kemampuan akademik dalam kebijakan evaluasi pendidikan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 16(1), 33–46.
- Rahmawati, D. (2022b). Tes kemampuan akademik dan seleksi pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 16(1), 33–46.
- Rusman. (2021). Paradigma evaluasi pendidikan dalam kebijakan assessment nasional. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 27(2), 145–158.
- Rusman. (2022). Pemanfaatan data assessment nasional untuk peningkatan mutu sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 28(1), 1–14.
- Suryadi. (2021). Asesmen kompetensi minimum sebagai paradigma baru evaluasi pendidikan. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 9(1), 15–27.
- Tilaar, H. A. R. (2021). Reformasi evaluasi pendidikan dan tantangan kebijakan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 27(3), 201–214.
- Widyastono, H. (2020). Evaluasi pembelajaran abad ke-21 dan tantangan kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(3), 289–302.
- Widyastono, H. (2021). Teaching to the test dalam kebijakan evaluasi pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(1), 67–80.